

Demokrasi di Ujung Tanduk?

PERCAYA atau tidak, perpolitikan di negeri ini semakin kotor karena politik uang. Bahkan banyak tokoh politik sekarang ini justru dengan bangga berkubang dalam lumpur politik yang kotor itu. Padahal tujuan mulia politik untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan itu sudah membias sedemikian rupa karena nafsu pragmatisme para elite yang berburu harta dan kekuasaan. Kondisi ini jelas akan mengancam sistem demokrasi. Lalu, bagaimana?

Tidak dipungkiri, bahwa demokrasi yang sudah berjalan jauh di negeri ini sedang menghadapi ujian bertubi-tubi. Ujian terhadap demokrasi muncul dari berbagai dimensi. Sementara itu arus globalisasi melanda negeri ini. Dengan demikian, paham demokrasi di Indonesia berada dalam posisi yang terjepit antara derasnya arus globalisasi yang menuntut adanya transparansi dan demokratisasi dengan masih kuatnya politik uang, semangat sektarianisme dan etnisitas. Karena itu tidak mengherankan jika terjadi tawar-menawar pelaksanaan demokrasi.

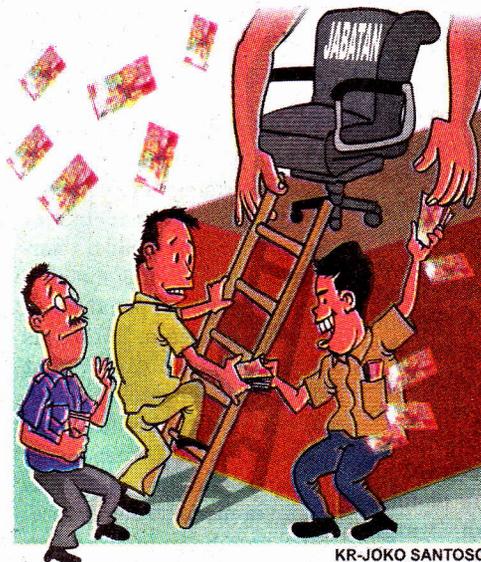
Di sisi lain, masalah-masalah yang menggerogoti demokrasi, terutama sekali yang bersumber pada masalah regionalisme, provinsialisme, sentrifugalisme, kolektivisme atau nasionalisme etnik, sejak reformasi digelar dapat dikatakan masih menggejala dan menghambat pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Perubahan dan perkembangan ini tidak saja menghambat perjalanan demokrasi, namun pada gilirannya akan semakin membingungkan lapisan masyarakat yang ingin memahami arah perkembangan perpolitikan di negeri ini. Kondisi seperti itu banyak berpengaruh terhadap dirinya sebagai individu tetapi juga sebagai warga negara.

'Kemadegan'

Kita sadari pula bahwa bangsa kita terlalu cepat melompat ke demokrasi modern, sehingga muncul berbagai masalah. Kondisi yang terpola dalam waktu kurang lebih tiga dasawarsa dalam kungkungan realitas yang semu, merupakan kendala yang begitu berat bagi bangsa kita, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara untuk beranjak ke pemikiran masa de-

A Kardiyat Wiharyanto

pan. Model kepemimpinan, *sharing* sosial, politik dan tentu saja ekonomi nampak jelas bahwa banyak orang baru berada dalam tahap demokrasi dini, di mana individu masih memberi penilaian moral atas dasar kepentingan egoisnya sendiri. Hal ini yang menyebabkan praktik



KR-JOKO SANTOSO

monopoli dan korupsi terus menggejala.

Dengan kondisi yang masih memprihatinkan itu, apakah demokrasi modern yang kita bina sampai saat ini bisa mempengaruhi rasa keindonesiaan kita untuk menuju ke masyarakat baru Indonesia yang menyejukkan atau malah sebaliknya?

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sesungguhnya rakyat sudah semakin dewasa berpolitik, namun yang di atas justru tampak adanya kekurangdewasaan berpolitik. Jika kita jujur, sesungguhnya kondisi negeri ini sedang mengalami *kemandegan* di semua aspek kehidupan. Dalam kondisi seperti itu, kiranya kita perlu melihat cita-cita para pendiri negara ini sekitar 70 tahun yang lalu. Secara historis faktual dan politis strategis, terlihat dengan je-

las betapa tingginya kematangan persepsi, kecermatan antisipasi dan kearifan sikap para pendiri negara ini dalam mempertaruhkan segalanya demi terbentuknya negara Indonesia.

Melihat sejarah pembentukan negara nasional itu, kita semua pantas merasa malu. Jika di antara kita masih ada yang menyimpan pikiran dan obsesi yang tertekat-kotak dan ingin menonjolkan kepentingan pribadi atau kelompoknya di atas kepentingan umum. Sikap itu bukan hanya menunjukkan lunturnya cita-cita luhur Bangsa Indonesia, namun merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi.

Politik Uang

Apabila kita coba merenungkan permasalahan yang berkembang saat ini, pada dasarnya bersumber dari sikap dan perbuatan egois yang kotor. Mungkin tidak disadari bahwa perjuangan yang berlatar belakang untuk kepentingan pribadi atau golongannya, akan mengingkari kepercayaan rakyat.

Di tengah-tengah keadaan demikianlah, kita dituntut untuk menjunjung tinggi semangat demokrasi sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam membina persaudaraan antar sesama warganegara. Padahal, pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres yang baru saja berlangsung di negeri ini, dinilai oleh dunia benar-benar demokratis.

Bagaimanapun juga sistem demokrasi memang tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran partai yang memang menjadi pilar utama sistem itu. Di sisi lain, partai di Indonesia pasti menjadi sarangnya politisi. Jika politik uang terus dibiarkan, jelaslah bahwa demokrasi berada di ujung tanduk.

Untuk itu, para politisi yang mengemban amanat rakyat harus mau belajar menjadi negarawan. Sehingga lebih memikirkan persoalan bangsa dan negara secara keseluruhan, bukan terpukau oleh kekuasaan sesaat. Hanya dengan itu demokrasi yang menyatakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat terselenggara. □ - g

*) Drs A Kardiyat Wiharyanto MM,

Dosen Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta.